



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Pemalang, 15 September 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, S.H, M.M
Pembina Utama Muda

NIP. 19680323 199003 1 012

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	10
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.....	22
2.3 Inovasi dan Hasil evaluasi SAKIP	27
2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.....	28
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	50
BAB III.....	51
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	53
BAB IV	59
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	59
4.1 Program dan Kegiatan	59
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76

J. RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG**BAB I
PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Pelaksanaan Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Berhasil tidaknya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana kualitas perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan dokumen tahunan yang mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu menjembatani antara perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pemalang secara substansial menjabarkan visi dan misi Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk tahun pertama periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang diselaraskan dengan perencanaan dan sasaran pembangunan Nasional.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan melakukan Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi dengan Bappeda dan Pemangku kepentingan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan Renja

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) yang telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6881);

20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standat Pelayanan Minimal;

31. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161)
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi –Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
35. Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9)
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
42. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 nomor 27);
43. Peraturan Bupati Pemalang nomor 23 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2023 Nomor 23)
44. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
45. Peraturan Bupati Pemalang nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2034 (Berita daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor xx)
46. Peraturan Bupati Pemalang Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Bahwa maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang ini adalah untuk menyusun arah dan kebijakan SKPD pada Tahun Anggaran 2026 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Dimana arah dan kebijakan SKPD harus dapat dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2026 yang disusun melalui prioritas program

kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diampunya. Prioritas program kegiatan dan sub kegiatan tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan APBD Tahun 2026 guna dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah:

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun 2026.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dibidang Penanaman Modal, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun 2026 dapat tercapai.
- c. Mengendalikan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pelayanan perijinan secara terpadu pada Tahun 2026.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah untuk :

- a. Memberikan acuan bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2026 guna menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan tolok ukur guna pengukuran dan evaluasi kinerja selama Tahun 2026 bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
- c. Memberikan arah dan tujuan bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2026 guna mencapai tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.3 Inovasi dan Hasil Evaluasi SAKIP, RB
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.5 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dalam Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke-sembilan berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi APBD penetapan sebesar Rp.5.923.537.400. Sedangkan pada perubahan anggaran mendapatkan tambahan sebesar Rp. 482.593.000., sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 6.406.130.400, dengan rincian sebagai berikut:

• Belanja Operasi	Rp. 6.019.130.400
• Belanja Modal	Rp. 387.000.000 +
Total	<u>Rp. 6.406.130.400</u>

Anggaran yang diterima tersebut diupayakan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu guna memenuhi tuntutan masyarakat tentang pelayanan perijinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana yang disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel II.1 dibawah ini :

Tabel II.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar										
Bidang Penanaman Modal										
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	60	20	20	100	20	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	60	20	20	100	20	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	6	2	2	100	2	10	100

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Dokumen Perubahan DPASKPD									
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	3	1	1	100	1	5	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	6	2	2	100	2	10	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan	%	100	60	20	20	100	20	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	126	74	26	26	100	26	126	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	Laporan	5	3	1	1	100	1	5	100

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10	6	2	2	100	2	10	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	60	20	20	100	20	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	36	12	12	100	12	60	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	60	36	12	12	100	12	60	100

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	60	36	12	12	100	12	60	100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	36	12	12	100	12	60	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1.071	561	255	255	100	255	1071	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	980	588	210	90	42,8	210	888	90,6
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	%	100	60	20	20	100	20	100	100

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Daerah									
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	109	77	24	40	166,6	24	141	129,3
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	60	20	20	100	20	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	36	12	12	100	12	60	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	36	12	12	100	12	60	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	60	36	12	12	100	12	60	100

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah	%	100	60	20	20	100	20	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	84	51	21	26	123,8	21	98	116,6
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	36	12	12	100	12	60	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	2	1	1	100	1	4	100
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	132	79	33	0	0	33	99	75
Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	Persentase Peningkatan	%	18,45	9	3,10	-25,64	-827	3.15	-13,49	-73,1

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4*100%)
	jumlah investor									
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal	%	100	60	20	20	100	20	100	100
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	8	6	1	1	100	1	8	100
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi Investasi	%	100	60	20	20	100	20	100	100
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	0	0	0	1	1	100

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Program Promosi penanaman Modal	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	%	100	60	20	20	100	20	100	100
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai investasi	Rupiah	892.996 .004.082	516.343. 904.081	205.038 .302.261	220,159 .341.867	107,3	246.578 462.891	983.081 .708.839	110
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	4	1	1	1	100	1	3	75
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100
Program pelayanan Penanaman Modal	Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	%	479	286	96	100	104	97	483	100,8
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu	Persentase perijinan yang	%	100	60	20	20	100	20	100	100

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	disetujui									
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	27.500	16.500	15.000	13,465	89,7	6000	35.965	130,7
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	1.200	720	55	72	130	240	621,6	86

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
penyediaan Pelayanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	120	12	5	8	160	5	25	20,8
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	%	220	126	46	100	227,2	48	228	1124,5
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	100	60	20	20	100	20	100	100

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	96	66	22	22	100	22	110	114,5
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	45	27	9	9	100	9	45	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	66	39	13	13	100	13	66	100
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase realisasi perijinan	%	100	60	20	20	100	20	100	100
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non	Persentase tersusunnya Data/	%	100	60	20	20	100	20	100	100

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4*100%)
Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Pelayanan Perizinan									
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	<i>Dokumen</i>	5	3	1	1	100	1	5	100

Dari tabel kinerja tahun 2024 diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dapat di kategorikan Baik. Dapat dilihat dari 6 program yang ada, sebanyak 2 program mencapai kinerja 100%, dan ada 2 program yang capaiannya melebihi 100%. Capaian Kinerja yang kurang baik bisa dilihat pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dikarenakan realisasi investor hanya berjumlah 29 investor dari target sebanyak 38 investor. Walaupun demikian capaian realisasi investasi meningkat 11,67% dibandingkan dengan capaian realisasi investasi tahun lalu.

Untuk capaian kinerja dibawah 85% ada di sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan capaian 83%.

Adapun Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebesar 94,38%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, merupakan salah satu Dinas yang mempunyai tugas Pokok “Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan pelayanan terpadu satu pintu pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pemalang menangani perijinan non berusaha sebanyak 21 jenis ijin. Sedangkan untuk perijinan berusaha menggunakan system OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Adapun jumlah realisasi perizinan yang dikeluarkan Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang dalam 2 tahun terakhir yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2024 Sebagaimana tabel II.3

Tabel II.3
Realisasi Pelayanan Perizinan Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Ijin	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
1	Izin teraftar Pengobat Tradisional (STPT)	6	4	0	25	21	0
2	Izin Pemakaian Stadion Sirandu	13	9	0	12	9	0
3	Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo	2	2	0	5	4	
4	Izin Reklame						
	a. Izin Penyelenggaraan Reklame	471	471	0	471	471	0
	b. Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Reklame	14	11	0	13	9	0
5	Izin operasional Lembaga kesejahteraan social (LKS)/ Panti	10	4	0	4	5	0
6	Izin Pemakaman	25	24	0	17	17	0
7	Izin Krematorium	20	19	0	12	12	0
8	Izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan	4	4	0	6	4	0
9	Izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal	1	0	0	3	2	0
10	Izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini (PAUD)	6	4	0	3	3	0
11	Izin Pemakaian Alun-alun	0	0	0	0	0	0
12	Izin Pemakaian Taman Patih Sampun	0	0	0	0	0	0
13	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
14	Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan						
	-Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	166	165	0	0	0	0
	-Surat Ijin Kerja Radiografer (SIKR)	7	7	0	0	0	0
	-Surat Ijin Prakter Dokter (SIP)	295	264	0	206	195	
	-Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	461	453	0	315	313	
	-Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA)	97	101	0	38	36	
	-Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	51	52	0	16	17	
	-Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	6	4	0	4	6	
	-Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	10	10	0	11	12	
	-Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	8	8	0	9	9	
	-Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	3	3	0	1	1	
	-Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	4	4	0	1	1	
	-Surat Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan	6	6	0	4	4	
	-Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	194	200	0	139	139	
	-Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	26	27	0	0	0	0
	-Surat Izin Kerja Perekam Medis	27	27	0	0	0	0
	-Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	2	2	0	0	0	0

RENJA DPMPSTP TAHUN 2026

No	Jenis Ijin	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
	-Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	1	1	0	0	0	0
	-Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIPTW) /SIKTW	1	1	0	0	0	0
	-Surat izin praktik psikolog Klinis (SIPPK)	0	0	0	0	0	0
	-Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi	0	0	0	56	56	0
15	-Surat Izin Tukang Gigi	0	0	0			
16	Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	51	51	0	30	25	
17	Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	0	0	0
18	Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan local	0	0	0	0	0	0
19	Izin Insidentil	0	0	0	0	0	
20	Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro	1336 5	1336 5	0	12972	12973	
21	Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	0	0	0	0	0	0
22	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	147	149	0	92	74	0
23	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	15	9	0	12	13	
24	Izin Operasional Klinik	4	0	0	0	0	0
25	Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH)	2	2	0	0	0	0
26	Izin operasional Laboratorium Klink pratama	1	1	0	0	0	0
	JUMLAH	15.52 2	15.46 4	0	14.537	14.489	0

Capaian realisasi perijinan Non OSS pada Tahun 2024 cukup baik dengan realisasi sebanyak 14.489 izin terbit. Izin paling banyak terbit terdapat pada izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro yang mencapai 12.973 Izin terbit.

Selain capaian kinerja pelaksanaan kegiatan maupun keuangan sebagaimana tersebut diatas juga adanya capaian terhadap kinerja SKPD yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pematang Jaya. Salah satu indikator kinerjanya adalah terkait peningkatan investasi di Kabupaten Pematang Jaya. Pada tahun 2024 target investasi sebesar Rp.205.038.302.261 dengan realisasi investasi sebesar Rp.220.159.341.867 atau capaiannya sebesar 107,3%. Sedangkan untuk realisasi nilai SKM sangat baik karna dapat memperoleh nilai 89,70 dari target 88,95.

Berikut adalah realisasi atau capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan target RPJMD, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang

No	Indikator	SPM* nasional	IKU	Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anallisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN)		Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	3%	10%	12%	13%	9,73	11,67	12%	13%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan	84,0	88,95	89,80	89,85	88,93	89,70	89,80	89,85	
3	Persentase peningkatan jumlah investor			3,05	3,10	3,15	3,20	5,41	-25,64	3,15	3,20	
4	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non peijinan penanaman modal			96	96	97	97	99,89	100	97	97	
6	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan tepat waktu			44	46	48	50	100	100	48	50	
7	Persentase realisasi perizinan			100	100	100	100	156,92	89,77	100	100	
8	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			37	38	39	40	39	29	39	40	
9	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			176.666 .093.08 3	205.038 .302.26 1	246.578 .462.89 1	278.633 .663.06 6	197.152 .213.71 3	220.159 .341.86 7	246.578 .462.89 1	278.633.6 63.066	

2.3 Inovasi dan Hasil evaluasi SAKIP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah memiliki beberapa inovasi guna meningkatkan kemudahan terhadap pelayanan perizinan berusaha dan Non Berusaha. Dengan adanya inovasi ini yang sebelumnya pemohon harus datang langsung ke kantor untuk mengetahui syarat – syarat pengajuan ijin, sekarang bisa melalui online sehingga masyarakat dapat menghemat banyak waktu. Ada 3 Inovasi yang dimiliki yaitu :

1. Aplikasi SIMDU (Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu), yaitu aplikasi perizinan Non berusaha secara Online. Dapat di akses pada laman “izinonline.pemalangkab.go.id”.
2. Gerai Ivestasi (investasi.pemalangkab.go.id), Adalah sebuah web site yang berisi Sektor sektor potensi investasi beserta komoditas unggulan Kabupaten Pemalang.
3. Aplikasi Aduan Berbasis Elektronik “SAMBATSUNG”, merupakan aplikasi pengaduan pelayanan perizinan berbasis website.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan Evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen yang digunakan sebagai data pendukung evaluasi antara lain laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024, Rencana Strategis Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Renja tahun 2024 dan tahun 2025, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024, serta dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang memperoleh nilai skor 69,46 dengan kategori B (Baik). Penilaian tersebut menunjukkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu perbaikan tidak mendasar. Nilai B merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.5
Hasil Evaluasi SAKIP

Komponen SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kabupaten Pemalang	
	No: 700/183/EVS/V/2024 Tgl: 27 Mei 2024	No.700.1.2.1/0442/2025 Tgl:30 April 2025
	2024	2025
Perencanaan Kinerja	21,07	22,47
Pengukuran Kinerja	19	21,75
Pelaporan Kinerja	9,87	9,91
Evaluasi Internal	13,90	15,33
Capaian Kinerja	Tidak termasuk komponen SAKIP pada Tahun 2022, sesuai permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021	Tidak termasuk komponen SAKIP pada Tahun 2022, sesuai permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021
Nilai SAKIP	63,84	69,46

2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

2.4.1 Permasalahan dan hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai satu urusan yaitu Penanaman Modal. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang dihadapi adalah :

1. Belum terintegrasinya seluruh pelayanan perijinan pusat, daerah, BUMN, BUMD dan swasta dalam satu tempat (MPP belum mengakomodir seluruh instansi yang ada).
2. Belum diimplementasikannya pemberian insentif bagi investor.
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal dalam peralihan sistem dari OSS v.1.1. menjadi OSS-RBA.
4. Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi.

5. Tidak terkendalinya harga tanah pada kawasan peruntukan industri.
6. Adanya kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) mempengaruhi proses investasi yang akan masuk di Kab. Pematang.
7. Terhambatnya proses perijinan melalui OSS RBA karena sampai saat ini belum tersusunnya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) akibat adanya kebijakan LSD.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul maka perlu dirumuskan kebijakan masing-masing Perangkat Daerah guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merealisasikan Visi dan Misi Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kabupaten Pematang periode Tahun 2025 – 2029.

Salah satu isu nasional yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka peluang investor untuk masuk ke Kabupaten Pematang semakin terbuka lebar. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang perlu meningkatkan kinerja dari segi peningkatan kualitas SDM, sarana, dan prasarana dalam memberikan pelayanan terhadap Investor.

Penanaman Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan non perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolanya sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Tujuan Penanaman Modal adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Dasar Penanaman Modal

1. Pengembangan iklim Penanaman Modal
2. Promosi Penanaman Modal
3. Pelayanan Penanaman Modal
4. Pengelolaan data dan system informasi Penanaman Modal
5. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal, dan
6. Pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka sangat berdampak positif untuk ikut meningkatkan kemakmuran /kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pematang Jaya. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pematang Jaya terkait investasi yaitu harus siap untuk menghadapi persaingan global dalam usaha menarik investor untuk berinvestasi. Isu strategis pada lingkup tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya yaitu perlu untuk mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan investasi maka perlu adanya langkah-langkah yang kongkrit/nyata.

Adapun langkah- langkah yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Belum diimplementasikannya pemberian insentif bagi investor :

Didukung 2 program

- a) Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.

Indikatornya : Persentase peningkatan jumlah investor.

- b) Program Promosi Penanaman Modal

Indikatornya : Persentase terlaksananya promosi penanaman modal

2. Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya :

Didukung 1 Program

- a) Program Promosi Penanaman Modal

Indikatornya : Persentase terlaksananya promosi penanaman modal

3. Tidak terkendalinya harga tanah pada kawasan peruntukan industri:

Didukung 1 program

- a) Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.

Indikatornya : Persentase peningkatan jumlah investor.

4. Belum terintegrasinya seluruh pelayanan perijinan pusat, daerah, BUMN, BUMD dan swasta dalam satu tempat

Didukung 2 program

- a) Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikatornya : Presentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal

- b) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikatornya : Presentase realisasi perijinan

2.4.2 Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Dengan di keluarkanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang membuat dan mengatur proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat maka di harapkan akan memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di Kabupaten Pematang.

Isu lainnya yang perlu menjadikan perhatian juga adalah dengan adanya Amanat Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengharuskan setiap Kabupaten/Kota mempunyai Mal Pelayanan Publik Digital. MPP Digital menjadi bagian dari Portal Nasional Pelayanan Publik yang terdiri atas : Portal Pelayanan Publik Pemerintah Pusat yang terdiri atas pelayanan publik semua kementerian dan Lembaga, dan Portal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di dalam Provinsi tersebut. Saat ini terdapat 17 instansi pemerintah baik vertikal maupun horsonal yang telah berpartisipasi menempatkan petugasnya dalam MPP Kabupaten Pematang.

Tabel. II.7
Analisis SWOT

<p>ISU STRATEGIS</p>	<p>KEKUATAN (STRENGTH)</p> <ol style="list-style-type: none"> Potensi peluang investasi di berbagai sektor dan daya dukung investasi di Kabupaten Pematang Ditetapkannya Kawasan Peruntukan Industri melalui Perda Kabupaten Pematang No 1 Tahun 2018 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2018-2038 Tersedianya sarana dan prasarana Sistem Informasi Investasi (Gerai Investasi) 	<p>KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> Upaya peningkatan promosi penanaman modal investasi belum optimal dalam rangka meningkatkan penanaman modal Upaya meningkatkan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya Belum optimalnya pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam mal pelayanan publik
<p>PELUANG (OPPORTUNITY)</p> <ol style="list-style-type: none"> Dukungan Pemerintah melalui terbitnya UU Cipta Kerja Pengembangan Mall Pelayanan Publik Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat sebagai media promosi Penanaman Modal 	<p>STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Promosi Penanaman Modal Peningkatan Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 	<p>STRATEGI WO</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
<p>TANTANGAN (THREAT)</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih adanya konflik kepentingan baik social ekonomi maupun lingkungan dalam pelaksanaan penanaman modal Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya Tidak terkendalinya harga tanah pada kawasan peruntukan industri 	<p>STRATEGI ST</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 	<p>STRATEGI WT</p>

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam upaya pencapaian target pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun berdasarkan kerangka kebijakan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Bupati terpilih yaitu :

Visi : “ PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”

Misi ada 8 yaitu :

1. **Misi 1 Resik:** menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
2. **Misi 2 Hijau:** meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
3. **Misi 3 Apik:** meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
4. **Misi 4 Peduli:** meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
5. **Misi 5 Silaturahmi:** meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.
6. **Misi 6 Organisatoris:** meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
7. **Misi 7 Digitalisasi:** memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.
8. **Misi 8 Ikhlas:** menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Sejalan visi dan misi tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati ke 3 yaitu “ **CAKAP** “ dan Misi ke 3 yaitu “**APIK: Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah**”

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi berdasarkan potensi lokal yaitu peningkatan pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, hilirisasi pertanian, pengembangan industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

Guna mencapai tujuan pembangunan daerah Tahun 2026 keterkaitan Isu Strategis , prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 diarahkan pada “ **Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia**”

Memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 jika dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, maka prioritasnya adalah Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang Berkualitas dan Berbasis Tehnologi melalui Peningkatan layanan kemudahan investasi (regulasi insentif pelaku usaha, peta potensi investasi, Mal Pelayanan Publik Digital, Rencana Umum Penanaman Modal.

Adapun guna untuk merealisasikan prioritas tersebut perlu disusun program dan kegiatan untuk mendukungnya, dimana berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disusun program, Kegiatan dan sub kegiatan masih mengacu pada program dan kegiatan tahun 2025.

Tabel II.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas PMPTSP	Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	5.246.483.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas PMPTSP	Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	5.246.483.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	59.690.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	59.690.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.350.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.350.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	2.826.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	2.826.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	3.696.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	3.696.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	2.381.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	2.381.000	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SKPD		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD			SKPD		Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	4.456.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	4.456.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.136.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.136.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	39.844.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	39.844.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan	100%	4.228.946.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan	100%	4.228.946.500	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	4.225.567.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	4.225.567.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.861.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.861.000	
	Penyusunan Pelaporan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	2 Dokumen	1.518.500	Penyusunan Pelaporan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	2 Dokumen	1.518.500	

RENJA DPMPSTP TAHUN 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Realisasi Anggaran			dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Prognosis Realisasi Anggaran			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	186.249.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	186.249.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.883.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.883.250	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12.930.750	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12.930.750	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.804.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.804.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.015.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.015.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	71.616.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	71.616.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan	100%	644.872.000	enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan	100%	644.872.000	

RENJA DPMPSTP TAHUN 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah		pemerintah daerah			Daerah		pemerintah daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	144.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	144.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	499.272.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	499.272.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah	100%	126.725.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah	100%	126.725.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	55.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	55.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	61.725.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	61.725.000	
	Pemeliharaan/	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabil	Dinas	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	10.000.000	

RENJA DPMPSTP TAHUN 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PMPTSP	dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase peningkatan jumlah investor	3,20%	11.096.600	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL enetapan Pemberian	Dinas PMPTSP	Persentase peningkatan jumlah investor	3,20%	11.096.600	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal	100%	5.548.300	Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal	100%	5.548.300	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	5.548.300	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	5.548.300	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi	100%	5.548.300	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi	100%	5.548.300	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.548.300	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	5.548.300	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100%	26.473.400	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100%	26.473.400	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah nilai investasi	276.784.324.595	26.473.400	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah nilai investasi	276.784.324.595	26.473.400	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	21.115.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	21.115.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	5.358.400	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	5.358.400	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	97%	75.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	97%	75.000.000	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	Dinas PMPTSP	Persentase perijinan yang disetujui	100%	75.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase perijinan yang disetujui	100%	75.000.000	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Plaku usaha	5.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Plaku usaha	5.000.000	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	130 Keg Usaha	15.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	130 Keg Usaha	15.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	50%	62.430.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	50%	62.430.000	

RENJA DPMPSTP TAHUN 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	62.430.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	62.430.000	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	2.430.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	2.430.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9 Pelaku Usaha	5.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9 Pelaku Usaha	5.000.000	
	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	55.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	55.000.000	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase realisasi perijinan	100%	25.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase realisasi perijinan	100%	25.000.000	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100%	25.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100%	25.000.000	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	25.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	25.000.000	
JUMLAH TOTAL					5.446.493.000					5.446.493.000	

2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan di bidang urusan penanaman modal dengan fungsi Perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berasal dari 2 item, yang pertama dari tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan yang kedua dari hasil pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026. Berikut ini usulan dari masyarakat melalui mekanisme Survei Kepuasan Masyarakat dan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 :

- a. Survei Kepuasan Masyarakat :
 1. Kurangnya sosialisasi prosedur perizinan
 2. Kurangnya pemahaman pemohon terhadap prosedur perizinan
- b. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 :
 Facus Group Discussion (FGD) untuk penyusunan Renja tahun 2026 tidak dilaksanakan karna adanya efisiensi anggaran.

Dari hasil usulan masyarakat diatas maka tidak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan malakukan peningkatan kualitas pelayanan yang akan di akomodir pada Sub Kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJPN 2025-2045, Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Visi Presiden 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan Tujuh agenda pembangunan nasional yang dikenal sebagai Nawa Cita kedua, memperhatikan Nawa Cita Kedua tersebut yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk tahun 2026 yaitu **“Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”**.

2. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, pemerintah daerah menetapkan visi besar: *“Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang maju, untuk Menuju Indonesia Emas 2045”* Untuk mewujudkan visi tersebut, Provinsi Jawa Tengah menetapkan 6 misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Misi 1: Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan SDM yang mandiri, kompetitif, dan berwawasan global.
2. Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan.
3. Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas.
4. Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
5. Misi 5: Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal serta perlindungan hak dan kesejahteraan warga.
6. Misi 6: Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif serta mendorong pembiayaan pembangunan yang partisipatif.

Selanjutnya, dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, arah kebijakan dititikberatkan pada: “Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis.”

Memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 jika dikaitkan dengan kewenangan

yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya, maka prioritasnya adalah Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif serta mendorong pembiayaan pembangunan yang partisipatif melalui Peningkatan layanan kemudahan investasi (regulasi insentif pelaku usaha, peta potensi investasi, Mal Pelayanan Publik Digital, Rencana Umum Penanaman Modal).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan dan Sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah dalam mendukung Pelaksanaan penjabaran visi dan misi Bupati Pematang Jaya. Perwujudan Pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung misi ke 3 yaitu *“APIK: Meningkatkan Kabupaten Pematang Jaya sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah “* Dan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disebutkan salah satu prioritas pembangunan Tahun 2026 adalah Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif serta mendorong pembiayaan pembangunan yang partisipatif melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pematang Jaya tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029, seperti diuraikan pada Tabel III.1 dibawah ini :

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya investasi di kabupaten	Meningkatnya realisasi investasi di kabupaten	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	12,25
			Nilai realisasi penanaman modal	Rp	276.784.324.595
			Nilai SAKIP dan Nilai IKM	Nilai	- 63,86 - 89,85

Rencana Panjang Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045

RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun harus disusun berdasarkan rekomendasi yang tertuang di dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2045;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD dan perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam RKPD.

visi jangka panjang Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan yaitu “PEMALANG MULYA (MAJU, UNGGUL, LESTARI DAN BERBUDAYA)” dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Maju

Kemajuan suatu daerah atau masyarakat diartikan mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Kabupaten yang maju diartikan sebagai daerah yang berhasil mencapai tujuan pembangunan dilihat dari tingkat ekonomi, kemajuan teknologi, keamanan dan menjadi tempat yang ideal bagi masyarakatnya untuk hidup serta pelayanan fasilitas publik yang baik, pelayanan pendidikan serta fasilitas kesehatan yang sudah sangat memadai. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi wilayah yang maju dimana hal ini akan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan pemanfaatan teknologi dan penguatan inovasi.

B. Unggul

Masyarakat Kabupaten Pemalang yang memiliki kemampuan dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi, visioner serta memiliki pemikiran maju, optimistis, didukung semangat belajar dan berprestasi yang tinggi. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi wilayah yang unggul dimana hal ini akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan.

C. Lestari

Dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan saat ini, sedangkan di sisi lain tuntutan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, maka menjadi penting untuk membangun daerah Jawa Tengah dengan terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Perwujudan Kabupaten yang lestari merupakan komitmen untuk mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dengan keunggulan dari sisi komoditas pertanian dan perkebunan, potensi pariwisata, produk UMKM hingga inovasi. Prinsip yang ada berupa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dalam perwujudan pokok visi ini, Kabupaten Pemalang berkontribusi nyata pada target nasional untuk menarik investasi berkualitas ramah lingkungan, ramah sosial untuk meningkatkan daya saing daerah, membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru, serta mencegah resiko kebencanaan dan krisis iklim. Selain itu, beberapa upaya lain untuk mewujudkan Pemalang yang lestari adalah dengan bergotong royong dengan para pihak lintas sektor dan lintas latar belakang untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab ekosistem penting yang ada di Kabupaten Pemalang. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi wilayah yang lestari dimana hal ini akan fokus pada pembangunan berwawasan lingkungan.

D. Berbudaya

Masyarakat Kabupaten Pemalang di tahun 2045 diharapkan merupakan Masyarakat yang berbudaya. Makna dari Masyarakat berbudaya antara lain, Masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong, tata kelola pemerintahan yang baik, bertindak terpuji, tidak melakukan kerusakan serta memegang teguh nilai-nilai agama, tradisi, kearifan dan budaya lokal. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi Kabupaten yang berbudaya dimana hal ini akan fokus pada pengembangan budaya, agama dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 yang sesuai dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, antara lain :

**Tabel III.2 Tabel Realisasi dan Target Indikator Utama Pembangunan (IUP)
RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045**

No	Indikator Sasaran Pokok / Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Realisasi				Target Kabupaten			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Baseline 2025 Kab	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	14,27	13,39	13,17	12,15	12,38	12,63	12,76	12,91

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Perangkat Daerah yang menjadi bidang tugasnya.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat serta mempunyai tolok ukur guna pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang juga mendukung prioritas daerah dalam peningkatan kondusivitas wilayah yang akan mendukung iklim investasi dan perekonomian daerah melalui program pengembangan iklim penanaman modal dan program promosi penanaman modal diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan informasi tentang peta potensi penanaman modal di kabupaten pemalang.

Sedangkan kedudukan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang harus selaras dengan sasaran dan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Dimana rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 6 (enam) urusan Pemerintahan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, dan 4 (empat) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawas, 1 (satu) unsur kewilayahan yang terdiri dari 14 Kecamatan, dan 1 (satu) unsur Pemerintahan umum. Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam RKPD Tahun 2026 yaitu mengampu **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Urusan Penanaman Modal**.

Rumusan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana program yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut:

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - 2) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
 - 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
- e. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 - 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
 - 2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 - 3) Pengawasan Penanaman Modal
- f. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
 - 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel 4.1
MATRIK RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas PMPTSP	Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	5.246.483.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas PMPTSP	Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	5.246.483.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	59.690.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	59.690.500	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.350.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.350.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	2.826.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	2.826.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	3.696.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	3.696.000	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							RKASKPD			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	2.381.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	2.381.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	4.456.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	4.456.500	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.136.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.136.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	39.844.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	39.844.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan	100%	4.228.946.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan	100%	4.228.946.500	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	4.225.567.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	4.225.567.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.861.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 laporan	1.861.000	

RENJA DPMPSTP TAHUN 2026

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.518.500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.518.500	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	186.249.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	186.249.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.883.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.883.250	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12.930.750	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12.930.750	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.804.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.804.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.015.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.015.000	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	71.616.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	71.616.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	644.872.000	enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	644.872.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	144.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	144.600.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	499.272.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	499.272.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah	100%	126.725.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah	100%	126.725.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	55.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	29 Unit	55.000.000	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					atau Lapangan		Perizinannya			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	61.725.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	61.725.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase peningkatan jumlah investor	3,20%	11.096.600	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL penetapan Pemberian	Dinas PMPTSP	Persentase peningkatan jumlah investor	3,20%	11.096.600	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal	100%	5.548.300	Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal	100%	5.548.300	
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	5.548.300	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	5.548.300	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi	100%	5.548.300	Modal Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi	100%	5.548.300	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.548.300	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.548.300	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100%	26.473.400	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100%	26.473.400	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah nilai investasi	276.784.324.595	26.473.400	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah nilai investasi	276.784.324.595	26.473.400	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	21.115.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	21.115.000	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	5.358.400	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	5.358.400	
PROGRAM	Dinas	Persentase	97%	75.000.000	PROGRAM	Dinas	Persentase	97%	75.000.000	

RENJA DPMPSTP TAHUN 2026

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PMPTSP	terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal			PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PMPTSP	terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal			
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase perijinan yang disetujui	100%	75.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase perijinan yang disetujui	100%	75.000.000	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Plaku usaha	5.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Plaku usaha	5.000.000	
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan	130 Keg Usaha	15.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis,	130 Keg Usaha	15.000.000	

RENJA DPMPSTP TAHUN 2026

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
bidang perizinan berusaha berbasis risiko		pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			bidang perizinan berusaha berbasis risiko		evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	50%	62.430.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	50%	62.430.000	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	62.430.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	62.430.000	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	2.430.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	2.430.000	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9 Pelaku Usaha	5.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan	9 Pelaku Usaha	5.000.000	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
Pengawasan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	55.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	55.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase realisasi perijinan	100%	25.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase realisasi perijinan	100%	25.000.000	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100%	25.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100%	25.000.000	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah,	1 Dokumen	25.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	1 Dokumen	25.000.000	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Dikaji dan Dimanfaatkan			Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
				5.446.493.000					5.446.493.000	

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2026 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam menunjang Tugas dan Fungsinya serta mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Pemalang serta target dari tujuan dan sasaran Pemangunan Daerah.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Pemalang, 15 September 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, S.H, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680323 199003 1 012